

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TIMORENG PANUA KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Adam Latif¹⁾, Irwan²⁾, Muhammad Rusdi³⁾,
Ahmad Mustanir⁴⁾, Muh Sutrisno⁵⁾

^{1) 2) 4)}Dosen Ilmu Pemerintahan STISIP Muhammadiyah Rappang

³⁾Dosen Ilmu Administrasi Negara STISIP Muhammadiyah Rappang

⁵⁾Mahasiswa Ilmu Pemerintahan STISIP Muhammadiyah Rappang

e-mail: adamlatifsaja2017@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Serta untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian adalah pegawai di Kantor Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 8 orang dan seluruh Kepala Keluarga 765 orang. Jadi total populasi 773 Orang. Pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak dengan jumlah responden 77 Orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan kuisioner. Data yang terkumpul kemudian digunakan cara teknik analisis kuantitatif dengan tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan baik dengan persentase 78,65%. Indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat Musrenbang (Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan). Pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan baik dengan persentase 82,42%. Indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Pembangunan jalan tani (Infrastruktur Aksesibilitas). Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan sangat baik dengan nilai persentase 80,25%

Kata Kunci: *Partisipasi, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur*

A. PENDAHULUAN

Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrumen yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan,

sehingga pihaknya dapat menikmati mamfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah. Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (*Bottom-Up*) ternyata

tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa untuk didengar.

Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program pembangunan desa, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh jika program-program dalam pembangunan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dapat dipastikan pula, bahwa tujuan pembangunan akan tercapai pula. Bertolak pada gambaran di atas maka yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang ada di pedesaan. Secara khusus tahap perencanaan dan implementasi pembangunan yang berlangsung di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ketimpangan pembangunan infrastruktur, khususnya di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang, termasuk di dalamnya pembangunan prasarana dan sarana di pedesaan pada saat observasi awal ditemukan, bahwa pembangunan tersebut belum semua dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan Peraturan Desa Timoreng Panua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Timoreng Panua pada tahun 2016-2021, bahwa salah satu prioritas

pada tahun 2017 adalah dari program pembangunan infrastruktur yang ada, yakni:

1. Pembuatan jalan tani dan Drainase sebelah timur rumah Hj. Rahima.
2. Sambungan jalan tani sebelah Utara rumah H. Semmag.

Kedua hal tersebut belum terealisasi dikarenakan analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur tentunya menjadi harapan yang sangat besar bagi masyarakat terutama dalam hal drainase dan jalan tani. Akibat dari drainase tidak dibangun maka terjadi genangan air dirumah warga dan tentunya juga akan mempengaruhi saluran pembangunan. Selain itu, jalan tani yang belum dibangun masih berupa tanah sehingga ketika musim hujan akan menyulitkan petani dalam berkegiatan dan tentunya akan berefek pada perekonomian masyarakat itu sendiri, padahal masyarakat Desa Timoreng Panua sebagian besar pekerjaannya adalah petani.

Dalam pencapaian sasaran memerlukan tingkat partisipasi masyarakat dalam penentuan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Untuk mencapai sasaran yang kedua dimana kegiatan tersebut dilakukan

demi meningkatnya kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan untuk dapat mewujudkannya kondisi kemampuan masyarakat yang diharapkan. Sasaran terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pedesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sangat jelas mencantumkan bahwa partisipasi merupakan point utama.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Partisipasi Masyarakat

Menurut Adisasmita (2006) menyatakan, “Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan”.

Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan, apalagi perlu disadari percepatan pembangunan harus dimulai dari *bottom-up*, yaitu mengerakkan masyarakat agar berperan aktif dalam memajukan pembangunan. Titik sentral pembangunan memang terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya. Berkeinginan merubah dan memiliki keinginan untuk dirubah, merupakan

aset terpenting untuk memberdayakan masyarakat.

Beberapa alasan mengapa masyarakat perlu diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi, sebagaimana yang ditulis Adisasmita (2006), yaitu:

- Masyarakat memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya;
- Masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat;
- Masyarakat mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat;
- Masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana, teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya; dan
- Masyarakat dengan upaya meningkatkan kemampuan SDM-nya dan kemauan, sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.

Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi, sebagai berikut:

- Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha

- bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
 - c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
 - d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.
- Menurut (Mustanir, Yasin, Irwan, & Rusdi, 2018); Fachrudin Adi (2001:208), partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu:
- a. Tahap Assesment Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.
 - b. Tahap Alternatif Program atau Kegiatan Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.
 - c. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan.
 - d. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil) dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksudkan oleh peneliti, yakni keikutsertaan atau keterlibatan dari masyarakat dalam perencanaan dengan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, di mana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi di

daerahnya sendiri, sehingga pembangunan yang nantinya dilaksanakan di daerah mereka betul-betul seperti yang mereka butuhkan.

Partisipasi masyarakat dapat terjadi pada 4 (empat) jenjang, yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang di ambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Mustanir & Yasin, 2018).
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini ditegaskan bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan (Mustanir, Ahmad; Abadi, 2016) (Mustanir, Abadi, & Nasri, 2016).
- c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak

terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya, manfaat sosialnya dan manfaat pribadi (Mustanir & Lubis, 2017).

Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang ditetapkan atau ada penyimpangan (Josef Riwu, 2007:127).

2. Konsep Pembangunan

Pengertian pembangunan diartikan sebagai suatu “proses” pembangunan sebagai proses menggambarkan adanya pengembangan baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama (organisasi) sosial dan budaya (Mustanir & Darmiah, 2016). Hal ini merupakan gambaran umum masyarakat luas (*society*).

Menurut Bachtiar Effendi (dalam Akbar Effendi, 2014) pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya

yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Korten dalam Patton (2005:62), pendekatan dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, harus diubah dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat, artinya perubahan yang berlangsung dalam masyarakat dengan pendekatan pembangunan berorientasi pada masyarakat perlu diubah sebagai figur sentral pembangunan dengan dimensi

3. Pembangunan Infrastruktur

Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar Effendi (dalam Akbar Effendi, 2014) menyebutkan, bahwa pentingnya Infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Infrastruktur adalah berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh agen-agen publik

yang bertujuan untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pembuangan limbah listrik, penyediaan air, pembangunan limbah, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang serupa.

Pembangunan itu baik dari segi perencanaan maupun dalam peleksanaanya, harus membuahkan hasil dari masyarakat luas. Artinya, bahwa bentuk serta cara hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari keadaan sebelumnya, termasuk propek pengembangan potensi dan sumber kehidupan dimasa yang akan datang, bahwa sifat dan watak pembangunan yang akan dicapai itu harus sedemikian rupa bercirikan multidimensional, artinya bahwa pembangunan itu tidak harus saja mencakup suatu aspek saja melainkan harus mencakup seluruh aspek kehidupan (Mustanir & Jusman, 2016).

4. Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya.

Menurut Grigg (dalam Kodoatie, 2005) infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Misalnya dalam pembangunan jalan, dimana jalan

adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti, pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur seyogyanya diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar pemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna.

Serangkaian konsep yang disebutkan dengan berbagai teori, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa adalah suatu proses keikutsertaan sekelompok orang secara aktif dalam setiap usaha/kegiatan untuk melakukan perubahan secara terus menerus dan terencana guna untuk membawa perubahan yang lebih baik yang ditunjang dengan sarana fisik demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan (Mustanir, Barisan, & Hamid, 2017).

C. METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian memiliki dua variabel, yakni variabel pertama disebut variabel bebas yakni partisipasi masyarakat dan variabel kedua disebut variabel terikat, yakni pembangunan infrastruktur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian

kuantitatif menurut Sugiyono (2014:8) adalah Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sample filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan *instrument* penelitian, analisis data kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Ahmad (2015:175) deskriptif kuantitatif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, atau menghimpun data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif. Sugiyono (2014:7), metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat *positivisme*. Menurut Sugiyono (2014:137) berdasarkan teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan cara: Interview (Wawancara), Kuesioner (Angket) dan Observasi.

3. Teknik Analisis Data

Suharsimi Arikunto (2012:209-213) menjelaskan, bahwa analisis data

meliputi 3 (tiga) langkah, yaitu: persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis dalam analisis data adalah reduksi data dan tabulasi data. Berdasarkan keterangan di atas maka peneliti menggunakan gradasi, yaitu: sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, sangat tidak baik, untuk memudahkan menganalisa variabel-variabel.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Rapat Musrenbang Di Desa Timoreng Panua.

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat Musrenbang di Desa Timoreng Panua dikategorikan sangat baik dengan nilai rata-rata persentase 83,6%. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi media pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan sudah tentu mutlak adanya, disamping merangkul keikutsertaan masyarakat itu sendiri, partisipasi yang diberikan secara tidak langsung memberi peningkatan kapasitas program yang dijalankan, maupun bagi masyarakat itu sendiri.

Fokus utama dari Musrenbang adalah adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh

lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Musrenbang di Di Desa Timoreng Panua dilaksanakan selama bulan Januari.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan *bottom-up* di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun. Masyarakat di Desa Timoreng Panua seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah.

Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

1.1 Pelaksanaan Hasil Keputusan Rapat Pembangunan di Desa Timoreng Panua

Pelaksanaan hasil keputusan rapat pembangunan di Desa Timoreng Panua dikategorikan baik dengan nilai rata-rata persentase 78,4%. Dalam menentukan kesepakatan prioritas kebutuhan sebagaimana di atas dihasilkan tiga kesepakatan yang akan menjadi prioritas yaitu : Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari dana swadaya masyarakat dan atau dari pendapatan asli desa (PAD). Kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, namun kegiatan ini tidak dapat dibiayai dari dana ADD maupun Dana Desa, harus dimasukan sebagai prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa melalui swadaya masyarakat. Contoh kegiatan pembangunan mesjid atau mushalla, penataan tempat pemakaman, pembangunan gapura desa dan lain-lain.

Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD). Serta menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pusat dan akan pada Musrenbang kecamatan untuk diusulkan menjadi kegiatan yang

dibiayai APBD pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Contoh pembangunan jalan desa yang berstatus jalan kabupaten atau provinsi, pembangunan saluran irigasi tersier maupun sekunder yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

1.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Fasilitas Yang Ada di Desa Timoreng Panua

Partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas yang ada di Desa Timoreng Panua dikategorikan baik dengan nilai rata-rata persentase 77,6%. Membangun sesuatu adalah keberhasilan, dan merawat yang dibangun dengan penuh disiplin dari integritas pribadi adalah tanggung jawab. Dari kutipan ungkapan di atas kita tahu kalau pemeliharaan fasilitas umum adalah tanggungjawab bersama. Bukan hanya pemerintah yang membangun atau menyediakan tapi juga masyarakat yang mempergunakan. Tanpa adanya rasa tanggungjawab penggunaan, manfaat fasilitas umum ini tidak akan optimal. Masyarakat yang hanya tahu memakai dan tidak mau ikut serta dalam pemeliharaan akan semaunya sendiri menggunakan fasilitas umum. Hal ini bukan hal yang baik. Sebagai masyarakat yang baik, sudah seharusnya kita juga turut bertanggungjawab terhadap semua fasilitas umum yang telah pemerintah sediakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Tidak hanya diri kita yang mempergunakan fasilitas ini, tapi juga kebanyakan masyarakat atau bahkan semua anggota masyarakat

membutuhkan dan mempergunakan fasilitas tersebut. Jadi kita harus bekerja sama dengan pemerintah untuk memelihara fasilitas umum yang ada. Mempergunakannya sesuai dengan kegunaannya.

1.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Mengavaluasi Hasil Pembangunan Yang Telah Di Lakukan Di Desa Timoreng Panua

Partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam mengavaluasi hasil pembangunan yang telah di lakukan di Desa Timoreng Panua dikategorikan baik dengan nilai rata-rata persentase 75%. Pada dasarnya, evaluasi ialah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau suatu program berjalan dengan baik atau tidak. Suatu evaluasi sangat diperlukan ketika ingin mengatasi sebuah permasalahan. Evaluasi juga menjadi salah satu tingkatan dalam proses pengambilan kebijakan publik. Evaluasi itu sendiri menjadi langkah akhir dalam proses pengambilan suatu kebijakan yang tentunya kebijakan tersebut berdasar pada aktivitas sebelumnya. Oleh karenanya, evaluasi terhadap kebijakan publik dipandang sebagai kegiatan fungsional karena semua elemen kebijakan tersebut dari awal sampai terbentuknya kebijakan terus dievaluasi.

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang obyektif dan sistematis mungkin

terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan.

Berdasarkan rekapitulasi maka diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan baik dengan persentase 78,65%. Indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat musrenbang di Desa Timoreng Panua (Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan).

2. Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

2.1 Pembangunan Jalan Tani Yang Ada Di Desa Timoreng Panua

Pembangunan jalan tani yang ada di Desa Timoreng Panua dikategorikan sangat baik dengan nilai rata-rata persentase 85,8%. Jalan usaha tani atau jalan pertanian merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan), serta untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar.

2.2 Saluran Irigasi Yang Ada Di Desa Timoreng Panua

Saluran irigasi yang ada di Desa Timoreng Panua dikategorikan sangat baik dengan nilai rata-rata persentase

83,8%. Mengingat Desa Timoreng Panua adalah penghasil tanaman dan makanan utama penduduknya adalah beras, maka peran irigasi sebagai penghasil utama beras menduduki posisi penting. Irigasi memerlukan investasi yang besar untuk pembangunan sarana dan prasarana, pengoperasian dan pemeliharaan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan yang baik, benar, dan tepat sehingga pemakaian air untuk irigasi dapat seoptimal mungkin.

2.3 Persediaan Air Bersih Yang Ada Di Desa Timoreng Panua

Persediaan air yang ada di Desa Timoreng Panua dikategorikan baik dengan nilai rata-rata persentase 77,66%. Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan untuk pengairan sawah, untuk

treatment air minum dan untuk *treatment* air sanitasi.

Berdasarkan akumulasi maka diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan baik dengan persentase 82,42%. Indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Pembangunan jalam tani yang ada di Desa Timoreng Panua (Infrastruktur Akseibilitas).

3. Peranan Partisipasi Masyarakat (X) Dalam Pembangunan Infrastruktur (Y) Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang

Mengenai peranan partisipasi masyarakat (X) dalam pembangunan infrastruktur (Y) di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel akumulasi, berikut ini:

Tabel 1. Akumulasi Variabel Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur

No	Daftar Pernyataan	(%)	Kategori
1	Partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat musrenbang (Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan)	83,6%	Sangat Baik
2	Pelaksanaan hasil keputusan rapat pembangunan (Partisipasi dalam Pelaksanaan)	78,4%	Baik
3	partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas yang ada (Partisipasi dalam pengambilan manfaat)	77,6%	Baik

No	Daftar Pernyataan	(%)	Kategori
4	Partisipasi masyarakat dalam mengavaluasi hasil pembangunan yang telah dilakukan (Partisipasi dalam evaluasi)	75%	Baik
5	Pembangunan jalan tani yang ada (Infrastruktur Aksebilitas)	85,8	Sangat Baik
6	Saluran irigasi yang adad (Infrastruktur Produksi Pangan)	83,8	Sangat Baik
7	Persediaan air bersih yang ada (infrastruktur Kebutuhan Dasar Masyarakat)	77,66	Baik
Jumlah		561,8/7= 80,25%	Sangat Baik

Berdasarkan dengan data tabel di atas maka diketahui bahwa peranan partisipasi masyarakat (X) dalam pembangunan infrastruktur (Y) di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan sangat baik dengan nilai persentase 80,25%. Indikoator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Pembangunan jalan tani yang ada di Desa Timoreng Panua (Infrastruktur Aksebilitas). Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Timoreng Panua merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat guna memperlancar akses jalur pendistribusian hasil penen yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia, selain lambat dalam pendistribusian juga membutuhkan biaya dan tenaga yang besar. Guna memenuhi kebutuhan distribusi yang cepat dan efesien, maka pembangunan

jalan usaha tani merupakan alternatif untuk mempermudah para petani membawa pulang hasil panennya.

Adapun wawancara yang kami lakukan kepada kepala desa Timoreng Panua pertanggal 03 Desember 2018 Pukul 11:00 Wita mengatakan bahwa :

“Pertanian tetap menjadi salah satu prioritas kami. Kita ingin dengan pertanian, masyarakat lebih sejahtera. Untuk itu, sebagai pemerintah kampung, kita selalu mendukung penuh petani di sini, terutama menyediakan fasilitas dasar yakni jalan tani”

E. SIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian maka adapun Simpulan yang dapat kami kemukakan, sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan baik dengan persentase 78,65%. Indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah partisipasi masyarakat dalam mengikuti rapat musrenbang (Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan).
Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat. Jurnal SMARTek, Vol. 7, No. 4, Nopember 2009: Hal 292-300.
2. Pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan baik dengan persentase 82,42%. Indikator yang mempunyai nilai tertinggi adalah Pembangunan jalan tani yang ada (Infrastruktur Aksesibilitas).
3. Peranan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dikategorikan sangat baik dengan nilai persentase 80,25%.

Ariani, Dorothea Wahyu. 2005. *Manajemen Kualitas (Pendekatan Sisi Kualitatif)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta : Rineka Cipta.

Effendi, Akbar .2014. *Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Salingkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (2) : 2580-2593 ISSN 2338-3651. ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id

Fahrudin, Adi. 2001. *Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora. Jakarta : Hann Tan.

Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik*. Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo

Mustanir, Ahmad; Abadi, P. (2016). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KANYUARA

F. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: GrahaIlmu.

Asnudin, Andi. 2009. *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan*

- KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986>
- Mustanir, A., Abadi, P., & Nasri, A. (2016). Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan. In *International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)* (Vol. 84, pp. 356 – 359). Makassar: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.79>
- Mustanir, A., Barisan, B., & Hamid, H. (2017). *Participatory Rural Appraisal As The Participatory Planning Method Of Development Planning. Proceedings Indonesian Association for Public Administration (IAPA) International Conference Towards Open Government: Finding the Whole Government Approach*. Retrieved from <http://www.fisip.unair.ac.id>
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TETEAJI KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238.
- Mustanir, A., & Jusman. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI DI PASAR LANCIRANG KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG. *Jurnal Ilmiah Akmen*, 13(3), 542–558.
- Mustanir, A., & Lubis, S. (2017). Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning. In *International Conference On Democracy, Accountability, and Governance (ICODAG 2017)* (Vol. 163, pp. 316–319). Pekanbaru: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.60>.
- Mustanir, A., & Yasin, A. (2018). Community Participation in Transect on Development Planning. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik (JIAP)*, 8(2), 137–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.7994>
- Mustanir, A., Yasin, A., Irwan, I., & Rusdi, M. (2018). Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan

- Pembangunan Partisipatif.
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(4), 1–14.
Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1775>
- Patton, Michael Quinn. 2005. *Qualitative Research and Evaluation Methodes*. USA. Sage Publication Inc (Terjemahan)
- Kodoatie. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Edisi. Revisi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan secara Kelompok*. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak)*. Semarang: UNDIP Semarang.
- Yulianti, Yoni. 2012. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan*. Padang: Universitas Andalas.
- Undang- Undang:**
Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Tujuan Pembangunan Desa.
Peraturan Desa Timoreng Panua Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Desa Timoreng Panua pada tahun 2016-2021.